



Memihak Kebenaran

Pemimpin Umum:
Theo L Sambuaga

Wakil Pemimpin Umum:
Randolph Latumahina

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:
Primus Dorimulu

Editor at Large:
John Riady

Tajuk Rencana

“Legowo” Menerima Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 hari ini menjadi satu bab pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berdemokrasi.

Apa yang dianggap tidak sesuai aturan dalam penyelenggaraan pilpres menurut pemohon gugatan, dalam hal ini pasangan Prabowo-Hatta, telah diajukan ke pengadilan. Apa pun putusan sang pengadil harus diterima dengan *legowo*, baik oleh pemohon maupun termohon serta pihak terkait. Putusan MK adalah yang tertinggi dalam sengketa pilpres sehingga tidak dapat digugat lagi.

Legowo merupakan ungkapan Jawa yang artinya lebih kurang menerima secara ikhlas keadaan yang sedang terjadi. *Legowo* biasa melekat pada situasi kekalahan, kehilangan, atau ketidakmampuan. Kata ini juga berarti bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin muncul, atau sederhananya berarti lapang dada.

Sikap *legowo* selayaknya ada pada semua insan Indonesia yang berbudaya, tidak terbatas pada suku Jawa, daerah dari mana kata itu berasal. Bangsa kita memang harus terus belajar *legowo*. Pada banyak kasus, masyarakat kita perlu memiliki kebesaran hati menerima kekalahan. Sejumlah keributan supporter sepak bola yang merusak fasilitas umum dan menyebabkan jatuhnya korban menjadi gambaran bahwa lapang dada menerima kekalahan belum benar-benar menjadi budaya bangsa.

Pada tataran lain, rusuh antarwarga dalam ajang pemilihan kepala daerah juga menjadi contoh nyata sikap tidak ikhlas menerima kekalahan. Perusakan fasilitas umum, pembakaran gedung pemerintah bahkan sampai pembunuhan, seharusnya tidak terjadi bila yang kalah -sesuai norma dan aturan hukum yang berlaku- mau menerima kekealahannya.

Tidak berlebihan bila kita sebut proses Pilpres 2014 kali ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia terutama soal bagaimana mengedepankan sikap ikhlas menerima kekalahan ketika batas usaha sudah maksimal diupayakan.

Adalah sebuah langkah wajar ketika pihak yang kalah dalam pemilihan umum dan merasa terdapat kecurangan, menempuh jalur hukum. UU Pilpres dan Peraturan KPU mengatur jalur hukum yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Jalur hukum menjadi muara agar ketidakpuasan tersalurkan sehingga tidak berujung pada tindakan main hakim sendiri. Langkah seperti ini pernah dilakukan pasangan yang kalah dalam penghitungan suara pilpres sebelumnya. Juga dilakukan oleh banyak kandidat yang kalah dalam pilkada. Hasilnya, di ranah pilkada ada putusan gugatan yang membalikkan hasil perolehan suara, namun hal serupa belum pernah terjadi pada pilpres Indonesia.

Publik pasti sangat tahu bagaimana suasana hati kubu Prabowo-Hatta. Khusus Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus ini sudah dua kali mengikuti ajang pilpres. Pertama sebagai cawapres pada 2009 dan kini sebagai capres. Tentu keinginan untuk menang dalam persaingan sangat besar.

Lantas, meski hanya menempati posisi ke-4 pada pemilihan umum anggota legislatif (pileg), Gerindra berhasil menggandeng parpol besar yang perolehan suaranya lebih banyak. Gerindra bahkan bisa menjadi *leader* dari koalisi parpol pendukung Prabowo-Hatta. Kenyataan ini tentu semakin membunuh harapan besar akan kemenangan. Belum lagi bicara soal dana. Dalam perjalanan pencalonan hingga proses pemilu, tentu sudah miliaran rupiah dikeluarkan, bahkan mungkin mencapai triliunan. Secara psikologis, kita mengerti mengapa upaya hukum ke MK ditempuh. Demikian juga kekecewaan yang bakal muncul apabila gugatan pemohon tidak dikabulkan.

Memang, ikhlas gampang diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Mata hati publik bakal terbuka bila kubu Prabowo-Hatta dengan mudah dan ikhlas menerima. Ini membuktikan bahwa Prabowo-Hatta adalah pasangan pemimpin besar. Lima tahun ke depan masih ada ajang pilpres, di mana setiap pemimpin besar kembali bisa bertarung memperebutkan kursi nomor satu di negeri ini.

Meski tidak memenangi pilpres, Prabowo-Hatta adalah pemimpin yang melihat kepentingan bangsa lebih besar dari kepentingan partai atau pribadi. Kepentingan lebih besar itu berupa ketenangan kepada dunia usaha. Ketidakpastian hasil pilpres bakal membuat para pelaku bisnis *wait and see*. Seperti pada pengumuman hasil rekapitulasi KPU beberapa waktu lalu telah memberikan dampak positif yakni mendongkrak indeks saham dan rupiah.

Seluruh rangkaian Pilpres 2014 termasuk rentetan upaya hukum Prabowo-Hatta menjadi evaluasi dan catatan sehingga pemilu 5 tahun ke depan lebih baik lagi. Kita berharap bahwa tidak akan ada lagi ketidakpastian atau hiruk-pikuk politis berkait hasil Pilpres 2014. Juga tidak ada hiruk-pikuk yang sebenarnya di jalanan yakni pengerahan massa. Bisa dibayangkan, pengerahan puluhan ribu aparat kepolisian dan TNI dalam upaya pengamanan menjelang dan saat pengumuman putusan MK begitu banyak menguras energi. Apakah energi serupa bakal kita buang sementara masih ada segudang tantangan di depan. Sebaiknyalah kita bergandeng tangan membangun masa depan dengan *legowo* menerima kekalahan.

SASARAN

Sengketa Pilpres 2014 diputus hari ini.

– Semua harus patuhi apa pun yang menjadi putusan MK.

Pemerintah setuju harga elpiji 12 kg naik.

– Awas, biasanya sebelum kenaikan, elpiji akan langka.



Bioteknologi dan Ketahanan Ekonomi



AGUS PAKPAAN

Di mana letak bioteknologi dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia? Mengapa bioteknologi bisa dikatakan bagian dari Revolusi Industri? *Pertama*, bioteknologi membuka ruang baru yang sangat luas untuk hampir segala hal yang hingga dewasa ini teknologi lama tidak dapat memberikannya. Misalnya, daya adaptasi tanaman transgenik terhadap faktor lingkungan abiotik seperti kekeringan; daya tahan terhadap hama dan penyakit tanaman; pelengkapan kandungan zat tertentu seperti vitamin A pada tanaman padi; kemampuan menangkap langsung nitrogen dari udara sehingga mengurangi pencemaran air secara nyata.

Kedua, kecepatan penerapan dan pemanfaatan benih transgenik dan hasilnya yang sangat cepat. Kita bisa melihat pada tahun 1996, pada saat pertama kali benih transgenik legal dan aman dikomersialkan, luas penanamannya hanya 1,7 juta hektar, pada tahun 2013 menjadi 175 juta hektar. Kedua hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan alasan sebagai pertanda dunia pertanian sudah mengalami Revolusi Industri baru, menggantikan apa yang selama ini dinamakan *Green Revolution* (Revolusi Hijau).

Revolusi Hijau yang dikembangkan pada akhir 1960an. Kontribusinya, berhasil mendukung ketersediaan pangan bagi peningkatan penduduk dari 2 miliar pada 1950 menjadi 6 miliar pada 2000. Kritik untuk Revolusi Hijau adalah bibit unggul baru hasil Revolusi Hijau berpasangan dengan input lain-

nya yang sekarang ini semakin langka: air dan irigasinya, penggunaan pupuk N, P, dan K. Selanjutnya, tingkat penggunaan pupuk dan pestisida yang tinggi sehingga lingkungan tercemar.

Bioteknologi berbasis rekayasa genetik pada dasarnya mengatasi kekurangan-kekurangan dalam karakter Revolusi Hijau di atas. Sebagai ilustrasi kapas transgenik *Bacillus thuringiensis* (Bt) yang secara luas digunakan di banyak negara telah mengurangi penggunaan pestisida. Adapun Tebu NXI-4T Toleran Kekeringan yang dihasilkan oleh para peneliti dari Universitas Negeri Jember dan PTPN XI Jawa Timur memiliki potensi tahan terhadap stres akibat kekeringan.

Dampak penggunaan benih transgenik dengan kecepatan yang sangat tinggi dan skala penggunaan yang sangat luas di negara-negara yang telah mengadopsinya setelah 18 tahun penggunaannya, sudah banyak diteliti dampak positif dan negatifnya bagi lingkungan hidup. Penanaman benih transgenik ini tersebar di 27 negara.

Negara-negara di Asia yang sudah memanfaatkan benih transgenik secara industri pada 2013: India 11 juta hektar, RRT 4,2 juta hektar, Pakistan 2,8 juta hektar, Filipina 0,6 juta hektar dan Myanmar 0,3 juta hektar (total 18,9 juta hektare atau sekitar 11% dari 175 juta hektar). Sedangkan, 5 negara terbesar pengguna benih transgenik adalah Amerika Serikat 70,1 juta hektare, Brasil 40,3 juta hektare, Argentina 24,4 juta hektare, Kanada 10,8 juta hektare dan Paraguay 3,6 juta hektare dengan total keseluruhan dari 5 negara ini 149,2 juta hektare (85% dari total tanaman transgenik dunia).

Dari hasil riset, antara lain, The National Academy of Sciences (2010): “The Impact of Biotechnology on Farm-Level Economics and Sustainability” untuk kasus pengalaman di Amerika Serikat dan Eduardo J. Trigo (2011) untuk kasus pengalaman di Argentina, “Fifteen Years Of Genetically Modified Crops In Argentine Agriculture” diperoleh gambaran bahwa tanaman transgenik belum/tidak

memberikan dampak negatif yang nyata terhadap lingkungan hidup.

Ketahanan Ekonomi

Kecenderungan yang akan terjadi di Indonesia segera adalah jumlah penduduk yang bermukim di perkotaan akan melebihi jumlah penduduk yang bermukim di perdesaan. Apabila perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari kesuksesan industrialisasi, tidak menjadi masalah besar. Tetapi, risiko akibat kegagalan industrialisasi sebagaimana yang terjadi 40 tahun terakhir, maka kualitas migrasi dari desa ke kota akan lebih banyak dampak buruknya bagi kedua region tersebut.

Sangat jelas, dampak pertama adalah melemahnya ketahanan pangan dan menurunnya kualitas hidup dan derajat kehidupan masyarakat perdesaan. Berbeda dengan kasus industrialisasi yang dipicu dan dipacu oleh penemuan mesin uap, otomotif, atau bahkan teknologi informasi yang mana pengguna utamanya adalah masyarakat urban, maka pengguna utama bioteknologi ini adalah masyarakat perdesaan, khususnya para petaninya. Dampaknya juga sangat jelas yaitu perbaikan perekonomian perdesaan akan meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Pengalaman di Argentina kedelai menunjukkan bahwa manfaat dari penggunaan benih transgenik 72,4% dinikmati petani, Pemerintah menikmati 21,2% dan perusahaan perbenihan 6,4%.

Indonesia sebagai negara dengan penduduknya yang besar dan terus bertambah, lahan dan air yang semakin langka dan potensi lainnya yang terbatas, akan menghadapi pilihan yang semakin terbatas daripada keadaan sekarang. Bioteknologi merupakan salah satu faktor strategis yang memiliki potensi besar untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Tentu saja, bioteknologi yang dimanfaatkan harus sudah teruji selain aman pangan, aman pakan dan aman lingkungan, juga secara sosial-ekonomi menguntungkan Indonesia, khususnya bagi para petani.

PENULIS ADALAH PROFESOR (RISET)
BIDANG AGROEKONOMI